

## DETERMINAN KINERJA ANGGARAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY*

Nabila Putri Rachmadi<sup>1)</sup>, Anggeraini Oktarida<sup>2)</sup>, Kiagus Zainal Arifin<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

\*<sup>2)</sup> *Coresponden author*: anggeraini\_oktarida@polsri.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dalam perencanaan anggaran, pengelola anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan purposive sampling dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 59 orang. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan secara simultan Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money

### Abstract

*This study done with objective for identify influence accountability, transparency, and supervision to performance budget based value for money at the Regional Development Planning Board of South Sumatra Province. The population used in the study This is Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province employees involved in planning budget, manager budget, and implementation budget. The data collection technique used was purposive sampling with spread questionnaire as many as 59 people. This study use tool analysis multiple linear regression with SPSS version 26. Research results this show that Accountability, Transparency, and Oversight in a manner Partial influential positive on Budget Performance based Value for Money at the Regional Development Planning Board of South Sumatra Province. Whereas in a manner simultaneous Accountability, Transparency, and Oversight influential positive on Budget Performance based Value for Money at the Regional Development Planning Board of South Sumatra Province.*

**Keywords: Keywords:** *Accountability, Transparency, Supervision and Budget Performance based Value for Money*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, diperlukan pengelolaan kinerja anggaran yang baik. Pengelolaan kinerja anggaran mengacu pada pencapaian tujuan dan hasil dari penggunaan anggaran. Kinerja anggaran berbasis *value for money* digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kinerja anggaran dengan konsep *value for money* didasarkan pada tiga indikator yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan rancangan awal rencana strategis tahun 2019-2023 terdapat anggaran yang belum terealisasi dengan baik. Hal ini tentunya membuat Bappeda perlu melakukan upaya untuk menutup anggaran yang tidak terealisasi. Pada tahun 2022 beberapa target kinerja sudah tercapai, tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program yaitu belum optimalnya kualitas substansi perencanaan dan belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam realisasi anggaran diketahui setiap tahunnya anggaran pelaksanaan program mengalami fluktuasi yang artinya anggaran mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya.

**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021-2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi
Total Belanja	4,72	-0,60
Belanja Operasi	25,25	27,26
Belanja Pegawai	14,44	6,29
Belanja Barang dan Jasa	2,90	0,45
Belanja Modal	-37,19	- 29,77

Sumber: Ranwal Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022

Pada realisasi anggaran tahun 2021-2022 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data realisasi anggaran dalam rancangan awal renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022 bahwa penurunan realisasi ini disebabkan karena pembayaran tunjangan kinerja pegawai BAPPEDA hanya dibayarkan 6 bulan dari 12 bulan yang dianggarkan. Berdasarkan kendala yang dihadapi

pertahunnya setiap program yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran pemerintah masih belum terlaksana dengan teratur. Dimana anggaran dalam pembangunan daerah masih belum terealisasi secara sempurna. Artinya, kinerja anggaran belum terselenggara sesuai keinginan, harapan dan tujuannya. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, dibutuhkan cara untuk menekan masalah kinerja anggaran tersebut. Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Penelitian ini didasari hasil dari penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Mildawati, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Semakin baik pertanggungjawaban, maka akan semakin baik penerapan kinerja pada sebuah instansi pemerintah (Puspita Sari, 2021). Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan "Cindy Arifani, 2018 menyatakan akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja anggaran berbasis *value for money*."

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik (Mardiasmo, 2018). Transparansi dilakukan untuk proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pemerintah. Dalam penelitian "Ashari & Kaukab, 2020 menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*." Transparansi dalam pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum program atau kegiatan yang dilaksanakan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien, dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah (Ashari & Kaukab, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Irna Setiyanningrum, 2017), (Amin et al., 2022) dan (Batubara & Risna, 2020) (Batubara & Risna, 2020) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* secara parsial, dan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* secara simultan.

## 2. TELAHAH LITERATUR

### Teori *Stewardship*

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori *steward* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1991).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

### Kinerja Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 2021 menyatakan bahwa “kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang terutang dalam dokumen anggaran”.

### Konsep *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2018) *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi, merupakan perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.
2. Efisiensi, merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.”

### Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010 menyatakan bahwa “akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

### Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik.

## **Pengawasan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2017 dijelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money***

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) merupakan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Berdasarkan dari peneliti sebelumnya (Safitri & Mildawati, 2019) menyatakan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dan didukung oleh peneliti (Irna Setiyanningrum, 2017) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* karena pada pelaksanaan anggaran dibutuhkan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa agar efisiensi dan efektivitas dapat terjamin sehingga tujuan dan sasaran dapat berhasil dicapai. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

H<sub>1</sub> : Diduga akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money***

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya,

pelaksanaannya sampai hasil-hasil yang akan dicapai. Adanya transparansi membuat masyarakat semakin kritis dalam menilai setiap kejadian yang ada sehingga menjadi alat pengendalian (Cindy Arifani, 2018).

Dari penelitian sebelumnya (Safitri & Mildawati, 2019) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* dan didukung oleh peneliti (Sayuti, 2018) bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* karena pada penyelenggaraan pemerintah harus terbuka pada masyarakat umum agar pengumuman anggaran dapat diperoleh setiap saat dan mudah diakses oleh publik.

H<sub>2</sub> : Diduga transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money***

Menurut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) "Pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan."

Berdasarkan dari peneliti sebelumnya (Safitri & Mildawati, 2019) menyatakan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, dan didukung oleh peneliti (Irna Setiyanningrum, 2017) bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* karena pengawasan anggaran dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan metode pengawasan anggaran daerah sesuai dengan undang-undang secara efektif. Dengan demikian, ketika pengawasan dijalankan dengan baik dan benar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran akan terlaksana dengan baik dan benar apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan langsung melalui kinerja bawahan pengguna anggaran.

H<sub>3</sub> : Diduga pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value*

for Money pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

### **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money***

H<sub>s</sub> : Diduga akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money* secara simultan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

#### **Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, berfokus pada pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan dengan waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian yaitu pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 135 pegawai dengan menggunakan *purposive sampling*. Variabel independen yaitu Akuntabilitas ( $X_1$ ), Transparansi ( $X_2$ ), Pengawasan ( $X_3$ ) serta variabel dependen Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y). Populasi penelitian ini dari berbagai bidang yang terdiri dari bidang Sekretariat terutama sub bidang Pengendalian Evaluasi Pelaporan, Pengendalian Evaluasi dan Perencanaan Strategis (PEPS), Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), bidang Pemerintahan Kesejahteraan Sosial dan Rakyat (PKK), kelompok fungsional, Keuangan dan bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan (P3). Kuesioner yang disebar pada penelitian ini sebanyak 59, yang kembali sebanyak 57, tidak kembali sebanyak 2 dan

yang dapat diolah sebanyak 57 kuesioner yang berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran dan evaluasi anggaran dalam setiap bidang yang terbagi.

**Tabel 2**  
**Sampel Penelitian**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat	9
2	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis	7
3	Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	14
4	Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	5
5	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	11
6	Kelompok Jabatan Fungsional	13
<b>JUMLAH</b>		<b>59</b>

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

#### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 26.0.

#### **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas diukur menggunakan *pearson correlation*. Apabila tingkat probabilitas koefisien  $\alpha < 0,05$  maka pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar pengukuran yang dinilai dengan stabil atau konsisten. Apabila koefisien *Cronbach'S Alpha* ( $\alpha$ )  $> 0,60$  maka dapat dikatakan reliabel.

Variabel	Nilai Reabilitas	Keterangan
Akuntabilitas	0,709	Reliabel
Transparansi	0,820	Reliabel
Pengawasan	0,816	Reliabel

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam data

penelitian sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda terhadap data tersebut. Dalam pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji mutikolinieritas, uji autokorelasi dan uji linieritas.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

Tabel 3 berikut menampilkan hasil analisis regresi linear berganda.

**Tabel 3**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error		
1	(Constant)	7.305	4.008	1.823	.074
	Akuntabilitas	1.047	.192	5.442	.000
	Transparansi	.522	.102	5.122	.000
	Pengawasan	.362	.179	2.027	.003

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran VFM

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 4 mencantumkan nilai konstanta untuk setiap variabel. Berikut bentuk model regresi linier berganda.

$$Y = 7,305 + 1,047 X_1 + 0,522 X_2 + 0,362 X_3$$

Hasil persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa:

1. Konstanta sebesar 7,305 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independen, yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan = 0, maka kinerja anggaran berbasis *value for money* pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan sebesar 7,035.
2. Koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 1,047 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka dapat menaikkan kinerja anggaran berbasis *value for money* Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,047
3. Koefisien regresi untuk variabel Transparansi ( $X_2$ ) sebesar 0,522 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka dapat menaikkan kinerja anggaran berbasis *value for money*.
4. Koefisien regresi untuk variabel Pengawasan ( $X_3$ ) sebesar 0,362 menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka dapat menaikkan kinerja anggaran berbasis *value for money*.

**Tabel 4**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799 <sup>a</sup>	.639	.618	2.833

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,618 atau 61,8%. Hal ini berarti variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan dapat menjelaskan variabel kinerja anggaran berbasis *value for money* sebesar 61,8% dan sisanya sebesar 38,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini.

**Tabel 5**  
**Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	752.513	3	250.838	31.253	.000 <sup>b</sup>

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 31,253 dengan taraf signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. sedangkan nilai  $F_{tabel}$  diketahui sebesar 2,55. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai  $F_{hitung} >$  nilai  $F_{tabel}$  sehingga dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen seperti Akuntabilitas ( $X_1$ ), Transparansi ( $X_2$ ), dan Pengawasan ( $X_3$ ) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* (Y).

**Tabel 6**  
**Uji-t (Parsial)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error		
1	(Constant)	7.305	4.008	1.823	.074
	Akuntabilitas	1.047	.192	5.442	.000
	Transparansi	.522	.102	5.122	.000
	Pengawasan	.362	.179	2.027	.003

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran VFM

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada variabel akuntabilitas, uji statistik t menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel akuntabilitas sebesar 5,442 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya  $5,442 > 2,006$  (nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) dan nilai signifikansi 0,000  $<$  0,05. Hal ini berarti  $H_1$  diterima, sehingga secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel transparansi sebesar 5,122 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya  $5,122 > 2,006$  (nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_2$  diterima, sehingga secara parsial variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel pengawasan sebesar 2,027 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya  $2,027 > 2,006$  (nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_3$  diterima, sehingga secara parsial variabel pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

## Pembahasan

### Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Berdasarkan hasil uji statistik F di atas, menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  (31,253)  $> F_{tabel}$  (2,55) dan untuk nilai signifikansi (0,000)  $< 0,05$ . Hal ini bahwa  $H_4$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa nilai signifikan variabel akuntabilitas yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,000 atau  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis ini diterima atau akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Hal ini dikarenakan bahwa setiap pegawai dalam mengevaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan target dalam realisasi atau yang sesungguhnya terjadi, dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anak Agung Gede Dalem Sukawati Dewa Nata & Cokorda Gede Bayu Putra, 2023 dan Amin et al., 2022 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

### Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa nilai signifikan variabel transparansi yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,000 atau  $0,000 < 0,05$  sehingga hipotesis ini diterima atau transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap pemangku kepentingan mudah untuk mengakses dokumen perusahaan tentang rencana kerja dan anggaran perusahaan. Hasil pengujian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya (Amin et al., 2022) dan (Ashari & Kaukab, 2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

### Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa nilai signifikan variabel pengawasan yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,003 atau  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis ini diterima atau pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan kebijakan anggaran, aspirasi pemangku kepentingan menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran dan membantu mengawasi pengelolaan rencana kerja dan anggaran pemerintah. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Puspita Sari, 2021) dan (Batubara & Risna, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan:

1. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*.

#### SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi perangkat daerah lainnya, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam kinerja anggaran secara efisien dan efektif. Dengan demikian penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun anggaran di perangkat daerah dapat memenuhi kewajiban sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel yang lebih bervariasi lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*. Selanjutnya peneliti dapat menambah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner agar jawaban yang diisi lebih akurat.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Maryadi, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran. *Nobel Management Review*, 3(3), 438–451. <https://doi.org/10.37476/nmar.v3i3.3282>
- Anak Agung Gede Dalem Sukawati Dewa Nata & Cokorda Gede Bayu Putra. (2023). Pengaruh Akuntabilitas,

Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Instansi Pemerintah Se-Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 1–12.

- Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(5), 728–740. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i5.669>
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Cindy Arifani, Dr. A. S. A. R. (2018). pengaruh akuntansi, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13, 1–14.
- Donaldson, L. , & D. J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Irna Setiyanningrum. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *Profita*, 1–20.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terb)*. Andi.
- Puspita Sari, N. H. M. S. (2021). Determinan Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money Pada Sektor Publik (Studi pada SKPD Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* , 2, 1–10.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2010).

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (2021).
- Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Empiris pada Satuan .... *Jurnal Ilmu Dan Riset* ....  
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2441>
- Sayuti, J. M. M. S. S. J. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1*, 16–28.